

ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM Mendukung PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ANALYSIS OF REGIONAL ASSET MANAGEMENT IN SUPPORTING REGIONAL ORIGINAL INCOME IN KUANTAN SINGINGI REGENCY

Risma Sari¹⁾ Harlen²⁾ Sri Endang Kornita³⁾

¹⁾Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

²⁾Dosen Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

ABSTRACT: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset dalam mendukung pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini merupakan penelitian primer yang menggunakan 48 sampel key informan yang merupakan pihak dari dinas terkait yang berkaitan dengan pengelolaan aset di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan alat analisis yaitu analisis B/C ratio dan analisis SWOT. Hasil penelitian ditemukan bahwa Aset yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah aset Jalan, Irigasi dan Instalasi hal tersebut karena pembangunan jalan dan irigasi memberikan kontribusi dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Kuantan Singingi yang umumnya bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi melalui perhitungan B/C ratio tahun 2014-2020 diperoleh nilainya < 1 maka proyek itu tidak ekonomis, yang mana artinya ialah pengelolaan aset di Kabupaten Kuantan Singingi tidak ekonomis yang mana belum memiliki kontribusi yang besar. Strategi yang tepat bagi pemerintah dengan kondisi aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu SO (*strength and opportunities*) yaitu Strategi ini dibuat berdasarkan penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Kata Kunci : Pengelolaan Aset, PAD, SWOT

ABSTRACT : *This study aims to analyze asset management in supporting local revenue in Kuantan Singingi Regency. This research is a primary research that uses 48 samples of key informants who are parties from the relevant agencies related to asset management in Kuantan Singingi Regency. This study uses a quantitative descriptive research method with analytical tools, namely B/C ratio analysis and SWOT analysis. The results of the study found that assets that have the potential to increase regional income in Kuantan Singingi Regency are Road, Irrigation and Installation assets, this is because road and irrigation construction contributes to economic activities in Kuantan Singingi Regency which are generally engaged in agriculture and plantations. Management of regional assets in increasing regional income in Kuantan Singingi Regency through the calculation of the B/C ratio in 2014-2020 obtained a value of < 1 then the project is not economical, which means that asset management in Kuantan Singingi Regency is not economic which has not had a large contribution . The right strategy for the government with the condition of regional assets in Kuantan Singingi Regency is SO (*strength and opportunities*). This strategy is based on the use of strength to take advantage of opportunities.*

Keywords: *Asset Management, PAD, SWOT*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan barang fisik tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian seperti dijelaskan dalam teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik yang dikemukakan oleh Solow. Dalam Asumsi Model Solow yaitu bahwa perubahan faktor-faktor modal fisik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh modal fisik dan tenaga kerja. yang mana semakin baik modal fisik akan mendorong pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan (Tarigan, 2017).

Dalam aspek perencanaan fisik tentunya akan sangat erat kaitannya dengan keberadaan aset di daerah tersebut, aset tentunya menjadi elemen penting dalam wujud perencanaan fisik hal tersebut karena aset ialah wujud dari fisik itu sendiri. pengertian aset secara umum menurut (Siregar, 2004) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic*

value), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan), yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya.

Berdasarkan Permendagri no. 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan suatu tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Pengelolaan barang milik daerah yang tertib akan menghasilkan kesempurnaan dalam penyajian neraca daerah.

Aset Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Paragraf 60 (a) dijelaskan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di daerah. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010) menyatakan bahwa, aset daerah dapat di dayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.

Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya.

Salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah terutama melalui sektor properti. Potensi sektor properti di daerah tidak hanya dalam pembangunan properti saja, namun juga menyangkut pengelolaan properti yang sudah termanfaatkan ataupun yang belum termanfaatkan secara optimal. Banyak sumber yang dapat ditarik dari sektor properti, baik yang termasuk dalam kategori sumber penerimaan konvensional (seperti: PBB, PPI, BPHTB dan lain-lain) maupun sumber penerimaan baru atau non konvensional (seperti: *Development Impact Fees*, penerimaan akibat perubahan harga dasar tanah dan lain-lain).

Provinsi Riau adalah salah satu daerah yang masuk kedalam 10 besar dengan pendapatan daerah tertinggi di Indonesia, tentunya hal tersebut didorong oleh berbagai aspek. Provinsi yang memiliki 12 kabupaten kota ini tentunya kondisi masing – masing daerah akan berbeda – beda salah satunya terlihat dari pendapatan asli daerah masing – masing kabupaten dan kota di Riau. Untuk lebih jelas dapat dilihat berikut ini :

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2019 – 2020 (Ribu Rp)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020
1	Kuantan Singingi	78.575.322	73.950.440
2	Indragiri Hulu	118.978.915	107.175.423
3	Indragiri Hilir	153.779.207	181.576.925
4	Pelalawan	155.693.479	160.360.643
5	Siak	264.366.479	240.088.533
6	Kampar	262.882.860	238.691.177
7	Rokan Hulu	160.217.012	144.595.922
8	Bengkalis	226.245.885	228.733.125
9	Rokan Hilir	116.488.087	132.096.511
10	Kep. Meranti	79.075.989	105.780.352
11	Pekanbaru	710.129.197	994.101.907
12	Dumai	291.620.031	297.107.268

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau (2022)

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kota di Provinsi Riau, dimana dari 12 daerah tersebut Kota Pekanbaru ialah daerah dengan pendapatan asli daerah tertinggi dimana pada tahun 2019 sebesar Rp710.129.197 ribuan meningkat menjadi Rp994.101.907 ribuan di susul oleh Kota Dumai pada tahun 2019 sebesar Rp291.620.031 ribuan menjadi Rp297.107.268 ribuan selanjutnya baru daerah kabupaten sehingga dari ini dapat disimpulkan bahwa PAD daerah kota lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Sedangkan untuk daerah yang memiliki PAD terendah ialah Kabupaten Kuantan Singingi dimana pada tahun 2019 sebesar Rp78.575.322 ribuan menurun di tahun 2020 menjadi Rp73.950.440 ribuan.

Menjadi daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) terendah di bandingkan daerah lain di Riau, menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi menarik untuk di kaji lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasanya banyak aspek yang mempengaruhi kondisi penerimaan daerah salah satunya ialah melalui pengelolaan aset daerah. terutama melihat kondisi PAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun jenis aset yang ada di kabupaten kuantan Singingi untuk mendapatkan PAD adalah sebagai berikut: 1)Tanah, 2) Peralatan dan mesin, 3) Gedung dan bangunan, 3) Jalan, irigasi dan jaringan, 4) Aset tetap lainnya dan 5) Kontruksi dalam pengerjaan. Sedangkan fenomena yang terjadi terkait dengan penerimaan daerah d kabupaten Kuantan Singingi, dimana Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 kehilangan penerimaan dari pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang bersumber dari sewa tanah.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat berdasarkan jenisnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Jenisnya Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 - 2020 (Rp)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang Sah
2015	19.178.969.035,87	23.646.179.181,70	4.740.308.970	22.868.442.106,43
2016	20.329.029.199,25	1.518.653.299,56	2.656.132.358,00	23.672.437.979,63
2017	23.591.302.991,41	6.125.757.858,65	3.938.586.567,00	74.372.682.655,27
2018	26.609.374.255,08	5.592.154.867,65	3.923.183.661,00	40.960.153.129,93

2019	28.496.828.086,93	4.577.542.032,50	3.600.358.282,00	41.900.588.635,59
2020	27.704.671.966,20	3.984.679.428,11	2.616.409.290,00	39.644.679.772,45

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2022)*

Masalah tersebut mengakibatkan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kehilangan Pendapatan dari retribusi Pemakaian Kekayaan daerah sewah tanah pada tahun 2020 salah satunya ialah berumber dari keberadaan aset tetap daerah. Berikut ini dapat dilihat perkembangan nilai aset tetap di Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 3 Perkembangan Nilai Aset Tetap di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 - 2020

No	Tahun	Nilai Aset (Ribu Rp)
1	2014	3.422.038.676,05
2	2015	2.370.734.307,78
3	2016	2.470.108.971,36
4	2017	2.017.843.048,84
5	2018	2.218.889.951,06
6	2019	2.488.167.859,52
7	2020	2.465.936.863,12

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi (2022)

Hal ini tidak sesuai dengan salah satu implementasi dari penerapan UU nomor 23 tahun 2014 adalah pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumberdayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang dimiliki dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengarahkan sumberdaya yang ada serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset yang ada.

Adapun kajian terdahulu yang membahas terkait dengan pengelolaan aset daerah dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya yang dilakukan oleh (Widiantari & Jayantiari, 2017), dimana mengkaji terkait Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar, dimana diketahui bahwa Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah Kota Denpasar karena masih kurangnya pelaporan terhadap aset yang tidak dimanfaatkan dan kurangnya pencatatan atau inventarisasi terhadap aset yang dimanfaatkan, dan kurangnya tertib administrasi dalam inventarisasi aset, sehingga pengelola aset sendiri terkadang tidak mengetahui keberadaan asetnya dan kesulitan dalam menilai aset daerah yang akan dimanfaatkan.

Selain itu, (Zaki, Hidayat, & Syaparuddin, 2020) meneliti terkait Analisis pengelolaan barang milik daerah dan hubungannya dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi dimana diketahui bahwa dari 13 proses pengelolaan BMD oleh setiap OPD yang telah dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran, Pemanfaatan, Pengamanan, Penilaian, Pemindahtanganan dan Tuntutan Ganti Rugi. Sedangkan yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Pemeliharaan, Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pembiayaan.

Serta (Raharja, Pratiwi, & Wachid, 2015) meneliti tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan) dimana ditemukan bahwa Sumber daya manusia yang kurang berkualitas merupakan salah satu penghambat untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik. Sumber daya manusia yang masih kurang bukan hanya dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan tetapi juga dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Melihat fenomena yang dijelaskan sebelumnya diketahui bahwa adanya keterkaitan pengelolaan aset dengan peningkatan pendapatan asli daerah, mengingat pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Singingi merupakan terendah di Provinsi Riau, selain itu adanya beberapa kajian terdahulu yang mengkaji hal terkait ditemukan berbagai hal yang menentukan pengelolaan aset dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Sehingga berdasarkan fenomena tersebut maka penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja aset yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui apa strategi yang tepat bagi pemerintah dengan kondisi aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi

B.TINJAUAN PUSAKA

1. Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah karena pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut PP Nomor 58 tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintah yang bisa dinilai dengan uang termasuk juga semua kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban . Sedangkan menurut UU Nomor 23 tahun 2014 , keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang menjadi milik daerah karena adanya kegiatan pelaksanaan dan kewajiban tersebut.

Kemudian pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan , penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Khusaini, 2018).

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah mengubah pandangan, persepsi dan pola pikir pemerintah baik masyarakat dalam mengembangkan kebijakan pembangunan disemua bidang.

Sumber Pembiayaan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekontrasi dan tugas pembantuan (Khusaini, 2018).

2. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan daerah yang dari sumber-sumber penerimaan murni daerah (Siregar, 2004) . Pada digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu PAD harus diupayakan agar selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peranan PAD terhadap APBD mengalami peningkatan setiap tahun namun bila dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam anggaran daerah, peningkatan tersebut masi terlalu kecil.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fajri, 2018). Kemudian pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber keuangan daerah tersebut terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) dari kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah (BMD) sangat efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Sofyan, Hidayat, & Suryaningsih, 2021).

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya untuk mengurangi ketergantungan dalam mendapatkan dana (Fajri, 2018),

3. Aset Daerah

Aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Pengertian aset ini pada dasarnya berlaku pula untuk aset yang dikuasai atau dimiliki negara berdasarkan syarat-syarat tertentu (Siregar, 2004).

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda yang bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak baik berwujud (*Tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan (Siregar, 2004).

Aset-aset yang dikuasai oleh pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi (Widiantari & Jayantiari, 2017). Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sector-sector unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya (Siregar, 2004).

Peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah yang menyebutkan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.

4. Pengelolaan aset

Pengelolaan suatu kegiatan terdiri dari inventarisasi aset, legal, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian (Siregar, 2004), yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam suatu periode tertentu yang dilimpahkan pada instansi atau lembaga terkait di kabupaten Kuantan Singingi dalam penelitian Pengelolaan ini dilimpahkan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan artinya upaya untuk mengatur aktifitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif yang diawali penentuan strategi dan perencanaan (Ahmad, 2013).

Pemanfaatan aset tidak hanya berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) melalui sewa tempat-tempat tertentu, tapi juga berdampak pada sector-sector lain dari penerimaan pendapatan asli daerah dan membuka lapangan pekerjaan walaupun tidak berdampak signifikan (Fajri, 2018). Strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Nurina, 2014).

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana lokasi penelitian ini dipilih karena dilihat dari perkembangan PAD di Provinsi Riau dari 12 kabupaten dan Kota tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi memiliki PAD terendah dibandingkan daerah lainnya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari s/d Juni 2022.

2. Metode Analisis Data

1. Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama menggunakan analisis Benefit Cost Ratio. Benefit cost ratio (B/C R) merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya < 1 maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau > 1 berarti proyek itu feasible. Kalau B/C ratio = 1 dikatakan proyek itu marginal (tidak rugi dan tidak untung).
2. Untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga yakni strategi yang tepat bagi pemerintah dengan kondisi aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi ialah menggunakan analisis SWOT.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, dimana analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) proses ini melibatkan penentuan yang spesifik dari spekuasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara memilih cara berbagai hal yang dapat mempengaruhi keempat faktornya.

D. HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis data

Analisis B/C Ratio

Pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengarahkan sumberdaya yang ada serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset yang ada.

Berikut ini dapat dilihat analisis perhitungan *Benefit cost ratio* (B/C R) aset terhadap PAD d Kabupaten Kuntan Singingi tahun 2014-2020:

Tabel 4 Perhitungan *Benefit cost ratio* (B/C R)

No	Tahun	<i>Benefit cost ratio</i> (B/C R)
1	2014	0.01803
2	2015	0.02971
3	2016	0.02517
4	2017	0.05353
5	2018	0.35216
6	2019	0.03158
7	2020	0.02998
Rata-rata		0.077168

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan analisis B/C ratio tahun 2014-2020 diperoleh nilainya < 1 maka proyek itu tidak ekonomis, yang mana artinya ialah pengelolaan aset di Kabupaten Kuantan Singinggi tidak ekonomi yang mana belum memiliki kontribusi yang besar.

Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi, maka perlu diketahui apa saja yang menjadi faktor internal dan faktor eksternal dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

a. Identifikasi Faktor-Faktor Internal Pengelolaan Aset di Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam melakukan identifikasi faktor-faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan ditetapkan beberapa variabel dan indikator lingkungan internal dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil analisis matriks IFAS pada pengelolaan aset di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Analisis Matriks IFAS Pengelolaan Aset Di Kabupaten Kuantan Singingi

Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan			
Ketersediaan aset yang besar menjadi	0.172	4.667	0.804

pengelolaan aset sangat penting			
Ditetapkannya peraturan daerah/peraturan bupati tentang pengelolaan aset	0.167	4.533	0.759
Ditetapkannya target penyelesaian permasalahan aset dalam bentuk rencana tindak perbaikan (action plan)	0.155	4.2	0.651
Adanya monitoring dan evaluasi dari Inspektorat dalam pengelolaan aset	0.15	4.067	0.611
Kelemahan			
Belum ditetapkannya sistem insentif untuk pengelola aset secara jelas	0.076	2.067	0.158
Peraturan Pengelolaan Aset masih belum ada pembaharuan	0.093	2.533	0.237
Kurang memadainya kompetensi SDM di tingkat pelaksanaan pengelolaan aset	0.086	2.333	0.201
Belum dilaksanakannya tugas sesuai ketentuan oleh SDM di tingkat pelaksana pengelola aset	0.099	2.667	0.262
Total	1		3,683

Sumber: Data Olahan, 2022

Secara keseluruhan berdasarkan hasil akhir matriks IFAS, total skor dari matriks IFAS sebesar 3,683 yang terdiri dari skor indikator kekuatan sebesar 2,825 dan skor indikator kelemahan sebesar 0,858.

b. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal Pengelolaan Aset di Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil analisis matriks EFAS pada pengelolaan aset di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Analisis Matriks EFAS Pengelolaan Aset di Kabupaten Kuantan Singingi

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang			
Adanya pendampingan pengelolaan aset	0.218	4.2	0.916
Adanya peraturan perundangan di tingkat pusat yang mengatur dan mendukung pengelolaan aset daerah	0.221	4.267	0.943
Tersedianya referensi dan pakar yang berpengalaman dalam pengelolaan aset daerah	0.224	4.333	0.971
Ancaman			
Tidak memadainya data dan dokumen atas aset hibah dari Provinsi Riau dan Kabupaten Kuantan Singingi sebelum pemekaran	0.082	1.6	0.131
Sistem pencatatan yang masih menggunakan cara manual	0.131	2.533	0.332
Keberadaan aset yang tidak didata dengan baik	0.124	2.4	0.297
Total	1		3.590

Sumber: Data Olahan, 2018

Secara keseluruhan berdasarkan hasil akhir matriks EFAS, total skor dari matriks IFAS sebesar 3,590 yang terdiri dari skor indikator peluang sebesar 2,830 dan skor indikator ancaman sebesar 0,760.

c. Matriks IE

Berdasarkan hasil analisis matriks IE yang disusun dengan cara memplotkan total skor dari matriks IFAS (3,683) pada sumbu-x dan EFAS (3,590) pada sumbu-y, didapatkan posisi pengelolaan asset di Kabupaten Kuantan Singingi berada pada daerah pertumbuhan I yaitu memiliki kemampuan internal yang kuat dan eksternal yang sedang serta dalam keadaan yang stabil. Dalam keadaan ini paling baik usaha dikendalikan dengan menunjukkan bahwa pengelolaan asset di Kabupaten Kuantan Singingi yang tumbuh dan berkembang. dalam kondisi tersebut mengejar pertumbuhan. Strategi yang dapat diterapkan untuk bagian ini adalah strategi intensif atau strategi integrasi (ke depan, belakang, atau horizontal). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1: Matriks IE
Total skor IFAS

		Kuat 4.0	Rata-rata 3.0	Lemah 2.0	1.0
Total skor EFAS	Tinggi	I IFAS : 3,683 EFAS : 3,590		II	III
	Menengah	IV		V	VI
		VII		VIII	IX
	Rendah	VII		VIII	IX

Sumber: Rangkuti, 2009

Analisis matriks SWOT merupakan tahap pencocokan untuk menghasilkan alternatif strategi yang cocok dilakukan perusahaan, dengan melibatkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang sudah ditetapkan menggunakan matrik IFAS dan EFAS. Strategi yang dihasilkan merupakan pencocokan atau penggabungan dari faktor kekuatan dengan faktor peluang (S-O), faktor kelemahan dengan faktor peluang (W-O), faktor kekuatan dengan faktor ancaman (S-T), faktor kelemahan dengan faktor ancaman (W-T).

Berdasarkan analisis matriks SWOT menggunakan data yang telah diperoleh dari matriks IFAS dan EFAS maka ada empat strategi utama yang disarankan yaitu strategi SO (*strength and opportunities*) untuk pengelolaan asset di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Strategi ini dibuat berdasarkan penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Berikut ini merupakan alternatif strategi yang dapat ditawarkan adalah:

- a. mengembangkan, yaitu Besarnya Asset yang dimiliki dalam pengelolaan memanfaatkan pendampingan dalam kegiatan pengelolaan tersebut. Menetapkan peraturan pengelolaan aset merujuk pada perundangan yang mengatur pengelolaan tersebut
- b. Mempertahankan dan melakukan Kegiatan monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan referensi dan temuan pakar terkait dengan pengelolaan asset
- c.

d. Diagram Kuadran SWOT

Untuk menentukan posisi pengelolaan asset dapat menggunakan hasil dari matriks IFAS dan matriks EFAS, yaitu sebagai berikut:

Koordinat analisis internal:

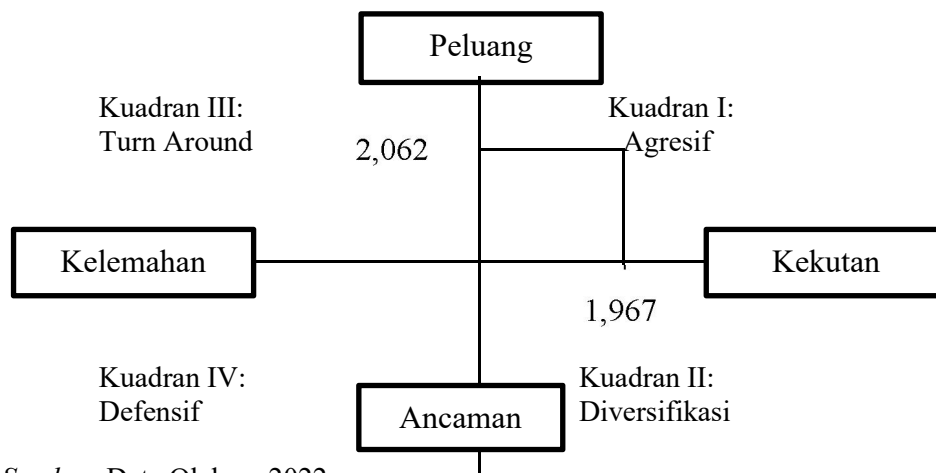
$Kekuatan - kelemahan: 2,825 - 0,858 = 1,967$

Koordinat analisis eksternal:

$Peluang - ancaman: 2,824 - 0,762 = 2,062$

Dari perhitungan diatas bahwasanya faktor kekuatan lebih besar dari pada faktor kelemahan dan pengaruh faktor peluang lebih besar dari pada faktor ancaman, sehingga pengelolaan asset di Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kuadran I yang berarti pada posisi agresif.

Gambar 2: Diagram Kuadran SWOT



Sumber: Data Olahan, 2022

Dari diagram kuadran SWOT diketahui bahwa pengelolaan asset di Kabupaten Kuantan Singingi berada pada posisi kuadran I yaitu posisi agresif, Adapun strategi SO menurut matriks SWOT yaitu:

- a. mengembangkan, yaitu Besarnya Asset yang dimiliki dalam pengelolaan memanfaatkan pendampingan dalam kegiatan pengelolaan tersebut. Menetapkan peraturan pengelolaan aset merujuk pada perundangan yang mengatur pengelolaan tersebut
- b. Mempertahankan dan melakukan Kegiatan monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan referensi dan temuan pakar terkait dengan pengelolaan asset

E. PEMBAHASAN

Aset Yang Berpotensi Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi berupaya melakukan pengelolaan ast yang mana diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan. Adapun disini asset yang dimaksud ialah asset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan instalasi dan asset tetap lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 15 responden penelitian, berikut ini dapat dilihat jawaban responden terkait asset tetap yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 7 Jawaban Responden Tentang Aset Potensial

No	Jenis Aset	Jumlah Responden	Persentasi (%)
1	Tanah	0	0,00
2	Peralatan dan Mesin	4	26,67
3	Gedung dan Bangunan	4	26,67
4	Jalan, Irigasi dan Instalasi	7	46,67

5	Aset tetap Lainnya	0	0,00
	Jumlah	15	100,00

Sumber: Data Olahan Primer (2022)

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa jawaban responden terkait dengan aset yang potensial ialah 7 responden atau 46,67% menyatakan jalan, irigasi dan instalasi aset yang potensial, sedangkan 4 responden atau 26,67% masing – masing menyatakan peratan dan mesin serta gedung dan bangunan merupakan aset yang potensial.

Berdasarkan jawaban tersebut diketahui bahwa sebagian besar menyatakan Jalan, Irigasi dan Instalasi ialah yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah, hal tersebut didukung dengan alokasi pengalokasian belanja untuk aset di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 yang paling besar dialokasikan untuk Jalan, Irigasi dan Instalasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Nilai Aset Tetap di Kabupaten Kuantan Singingi 2020

No	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	693.108.257.855,98
2	Peralatan dan Mesin	577.614.231.638,03
3	Gedung dan Bangunan	1.071.584.792.494,75
4	Jalan, Irigasi dan Instalasi	3.000.252.392.925,94
5	Aset tetap Lainnya	24.681.895.732,92

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi (2022)

Berdasarkan tabel 8 dapat terlihat bahwa nilai Jalan, Irigasi dan Instalasi sebesar Rp3.000.252.392.925,94 yang mana artinya terdapat pembangunan jalan, Irigasi dan Instalasi yang cukup besar.

Sebagaimana teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik yang dikemukakan oleh Solow bahwasanya Keberadaan barang fisik tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian. Dalam Asumsi Model Solow yaitu bahwa perubahan faktor-faktor modal fisik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh modal fisik dan tenaga kerja. yang mana semakin baik modal fisik akan mendorong pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan (Tarigan, 2017).

Jika ditelusuri keadaan perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi masih berada pada sektor primer yakni pertanian dan perkebunan tentunya keberadaan jalan, Irigasi dan Instalasi akan sangat berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. sedangkan yang dikatakan dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengelolaan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan analisis B/C ratio tahun 2014-2020 diperoleh nilainya < 1 maka proyek itu tidak ekonomis, yang mana artinya ialah pengelolaan aset di Kabupaten Kuantan Singingi tidak ekonomis yang mana belum memiliki kontribusi yang besar.

Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi karena masih kurangnya pelaporan terhadap aset yang tidak dimanfaatkan dan kurangnya pencatatan atau inventarisasi terhadap aset yang dimanfaatkan, dan kurangnya tertib administrasi dalam inventarisasi aset, sehingga pengelola aset sendiri terkadang tidak mengetahui keberadaannya dan kesulitan dalam menilai aset daerah yang akan dimanfaatkan. Dimana pemanfaatannya melalui sewa tanah, bangunan, peralatan dan mesin yang belum memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD, selain itu pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dimana mengatur tentang tarif

retribusi sewa aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sehingga pemungutan terhadap retribusi daerah dapat di maksimalkan.

Selain itu, pengadaan aset yang tidak potensial menjadikan penyebab tidak ekonomisnya peran aset dalam mendorong peningkatan PAD, banyak pembangunan dilakukan akan tetapi kegiatan justru mangkrak tentunya hal ini menjadikan keberadaan aset tidak menguntungkan daerah justru hanya menambah biaya pengeluaran.

Pengelolaan aset kedepan lebih ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintah daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan/mendongkrak pendapatan asli daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat.

A. Strategi Yang Tepat Bagi Pemerintah Dengan Kondisi Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan analisis data kekuatan utama pengelolaan aset di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Ketersediaan aset yang besar menjadi pengelolaan aset sangat penting dengan skor sebesar 0,804. Pada bobot dan rating rata-rata faktor internal tersebut memiliki bobot dan rating rata-rata tertinggi untuk indikator kekuatan yang artinya responden menganggap bahwa faktor tersebut merupakan kekuatan yang paling penting dibandingkan faktor kekuatan yang lain.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil akhir matriks IFAS, total skor dari matriks IFAS sebesar 3,683 dan hasil akhir matriks EFAS, total skor dari matriks IFAS sebesar 3,590. Sehingga matrik SWOT menunjukkan berada pada kuadran I, strategi utama yang disarankan yaitu strategi SO (*strength and opportunities*) untuk pengelolaan aset di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Strategi ini dibuat berdasarkan penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Berikut ini merupakan alternatif strategi yang dapat ditawarkan adalah:

- a. Mengembangkan, yaitu Besarnya Aset yang dimiliki dalam pengelolaan memanfaatkan pendampingan dalam kegiatan pengelolaan tersebut. Menetapkan peraturan pengelolaan aset merujuk pada perundangan yang mengatur pengelolaan tersebut
- b. Mempertahankan dan melakukan Kegiatan monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan referensi dan temuan pakar terkait dengan pengelolaan aset

Dalam upaya pengoptimalan aset (Widiantari & Jayantiari, 2017) menjelaskan bahwa Strategi atau upaya yang harus dicapai untuk optimalisasi aset daerah adalah dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai aset dan potensi aset daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, sehingga aset daerah bisa dikontrol dengan baik dan meminimalisir masalah yang muncul akibat aset tidak tercatat dan penggunaan aset yang tidak sesuai.

Sehingga perlunya memenuhi kebutuhan aset yang terkoordinir dengan baik hal tersebut dikarenakan aset adalah salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi. seperti yang dijelaskan oleh (Syapsan, Tampubolon, & Kornita, 2020) , pemenuhan infrastruktur dasar merupakan salah satu dimensi dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang bersifat multidimensi (Multidimensional Poverty Approach). Dengan pendekatan MPA, infrastruktur dasar dikategorikan sebagai dimensi standar kualitas kehidupan meliputi akses terhadap air minum yang bersih dan layak; akses terhadap sanitasi yang layak dalam rumah tangga; akses terhadap listrik; jenis bahan bakar untuk memasak; jenis lantai rumah dan kepemilikan aset.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aset yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah aset Jalan, Irigasi dan Instalasi hal tersebut karena pembangunan jalan dan irigasi memberikan kontribusi dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Kuantan Singingi yang umumnya bergerak di bidang pertanian dan perkebunan.
2. Pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan

Singingi melalui perhitungan B/C ratio tahun 2014-2020 diperoleh nilainya < 1 maka proyek itu tidak ekonomis, yang mana artinya ialah pengelolaan aset di Kabupaten Kuantan Singingi tidak ekonomi yang mana belum memiliki kontribusi yang besar.

3. Strategi yang tepat bagi pemerintah dengan kondisi aset daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu SO (*strength and opportunities*) yaitu Strategi ini dibuat berdasarkan penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Berikut ini merupakan alternatif strategi yang dapat ditawarkan adalah: 1) Mengembangkan, yaitu Besarnya Asset yang dimiliki dalam pengelolaan memanfaatkan pendampingan dalam kegiatan pengelolaan tersebut. Menetapkan peraturan pengelolaan aset merujuk pada perundangan yang mengatur pengelolaan tersebut 2) Mempertahankan dan melakukan Kegiatan monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan referensi dan temuan pakar terkait dengan pengelolaan aset

SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka dapat dirumuskan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlunya pengoptimalan dalam melakukan pemilihan pengadaan aset tetap di Kabupaten Kuantan Singingi, hal yang dapat dilakukan dapat berupa melakukan kajian mendalam terkait manfaat dari segala aspek terutama aspek ekonomi dalam pembangunan atau pengalokasian keberadaan aset sehingga memiliki kontribusi bagi pendapatan daerah selain itu mempertimbangkan dampak bagi masyarakat hal ini dapat menjadi masukan dalam rancangan APBD di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Perlunya upaya dalam mengorganisir pendapatan terkait keberadaan aset di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dapat diambil kebijakan berupa perdayagunaan aset tersebut sebagai sumber penerimaan daerah selain itu perlunya mempertimbangkan pemilihan pengadaan aset dengan potensialnya dari aspek penerimaan.
3. Pengelolaan aset yang besar di Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya terdapat kebijakan terkait melibatkan ahli dalam hal tersebut dalam melakukan pelatihan kepada SDM yang bertanggung jawab baik berupa pencatatan mendetail terkait keberadaan aset, selain itu pemerintah Kabupaten Kuansing perlunya melakukan pembaharuan terkait peraturan yang mengatur pengelolaan aset daerah oleh bupati sehingga dalam pelaksanaannya rujukan aturan lebih mempertimbangkan kondisi terkini salah satunya ialah mengatasi pencatatan yang masih manual sedangkan pusat telah menerapkan pencatatan menggunakan teknologi dengan software yang lebih canggih.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Y. (2013). *Ahmad, yani. (2013). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. . Malang: UB PRESS.
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3(1) , 111-117.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sofyan, A. T., Hidayat, R., & Suryaningsih, E. (2021). Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (Bmd) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(Pad) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019. *Syntax Idea* 3(4) , 693-710.

- Syapsan, Tampubolon, D., & Kornita, S. E. (2020). *Kemiskinan Multidimensi Dalam Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Di Riau*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 17(1): 24-33.
- Tarigan, R. (2017). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. . Jakarta: Bumi Aksara.
- Urip, T. P. (2017). Analisis Potensi Asset Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jayapura (Studi Kasus Potensi Pasar dan Terminal). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah* , 1-26.
- Widiantari, N. L., & Jayantiari, I. G. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana* , 1-5.
- Zaki, A., Hidayat, S., & Syaparuddin. (2020). Analisis pengelolaan barang milik daerah dan hubungannya dengan pendapatan daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika* 15(2) , 307-318.